

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembinaan Etika

2.1.1 Pengertian pembinaan

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan *pe-*an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan atau keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri. Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1986) mengatakan bahwa “etika adalah ilmu tentang tingkah laku atau perbuatan manusia yang di lihat dari sisik baik dan buruknya yang dapat di tentukan oleh akal manusia.”

Menurut Mangunhardjana, (1986), mengemukakan bahwa untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain:

- 1) Pendekatan informatif (*informative approach*) yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.
- 2) Pendekatan partisipatif (*participative approach*), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama. Pendekatan eksperiensial (*experientiel approach*), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok. Pembinaan tidak hanya dilakukan dalam keluarga dan dalam lingkungan sekolah saja, tetapi diluar keduanya juga dapat dilakukan pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler yang ada di sekolahan dan lingkungan sekitar.

2.1.2 Pengertian Etika

Secara etimologi kata “etika” berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *Ethos* dan *ethikos*. *Ethos* berarti sifat, watak kebiasaan, tempat yang biasa. *Ethikos* berarti susila, keadaban, kelakuan dan perbuatan yang baik. Istilah moral berasal dari kata Latin yaitu *mores*, yang merupakan bentuk jamak dari *mos*, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, watak, kelakuan, tabiat dan cara hidup. Sedangkan dalam bahasa Arab kata etika dikenal dengan istilah akhlak, artinya budi pekerti, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut tata susila.

Dalam buku etikanya menjelaskan lebih jelas lagi. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti seperti tempat tinggal yang biasa,

padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak artinya adalah adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau kepada masyarakat.

Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Kebiasaan hidup yang baik ini lalu dibekukan dalam bentuk kaidah, aturan atau norma yang di sebarluaskan, dikenal, dipahami, dan diajarkan secara lisan dalam masyarakat. Kaidah, norma atau aturan ini pada dasarnya menyangkut baik buruk perilaku manusia, atau etika dipahami sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik buruknya perilaku manusia yaitu perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari.

2.1.3 Konsep pembinaan

1) Definisi Pembinaan

Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninnya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan yang baru.

Berdasarkan pengertian-pengertian pembinaan di atas dapat ditegaskan bahwa pembinaan dianggap penting untuk memberikan daya atau kekuatan manusia agar menjadi sumber tenaga yang profesional sebagaimana yang diarahkan pada tujuan pembinaan itu sendiri.

Pada dasarnya pembina merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah, dan teratur secara bertanggungjawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.

2) Prinsip Pembinaan Etika

Ketika pembinaan dijalankan, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini:

- a) Obyektif pembinaan dilakukan berdasarkan kenyataan pada data dan fakta yang ditemukan di lapangan.
- b) Demokratis dilakukan dengan sikap yang akrab, hangat, menjunjung tinggi martabat guru dan kemitraan.
- c) Kerja sama dilakukan mengingat pembinaan mencakup ruang lingkup yang *holistic*, maka pembinaan perlu menjalin kekompakan dan kebersamaan.
- d) Konstruktif dan kreatifitas pembinaan dilakukan dalam suasana yang menyenangkan, memotifasi dan membangun dengan ide-ide yang baru, sehingga guru dapat termotifasi dalam mengembangkan potensi dirinya.
- e) Pembinaan perlu dilakukan secara terencana dengan program yang sistematis dan terus menerus sehingga perbaikan dapat dilaksanakan dan dipantau untuk diberikan usulan-usulan.

3) Tahapan-Tahapan pembinaan

- a) Perasaan Senasib
- b) Kebangkitan Nasional
- c) Sumpah Pemuda
- d) Proklamasi Kemerdekaan

4) Faktor-faktor yang Memengaruhi Pembinaan

a) Psikologi

Psikologi berasal dari kata Yunani '*psyche*' yang artinya jiwa, dan '*logos*' yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi (menurut arti kata) psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejala-gejalanya, proses maupun latar belakangnya.

b) Sosial

Sosial merupakan suatu hal yang berhubungan dengan lingkungan masyarakat. Dengan tujuan untuk hidup bermasyarakat serta

saling memahami kepribadian masing-masing sebagai anggota masyarakat. Dalam lingkungan sosial, manusia adalah makhluk sosial yang berarti saling membutuhkan orang lain untuk memenuhi sebagai kebutuhannya.

c) Motifasi

Kata ‘motif’ diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subyek untuk melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Menurut Suryabrata, S (Djaali, 2008:101) bahwa motifasi adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan.

2.2 Konsep Pembelajaran PPKn

2.2.1 Pengertian Pembelajaran PPKn

Pembelajaran PPKn merupakan salah satu mata pelajaran pokok di sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan warga negara dalam dimensi spiritual, rasional, emosional dan sosial, mengembangkan tanggungjawab sebagai warga Negara, serta mengembangkan anak didik berpartisipasi sebagai warga Negara supaya menjadi warga Negara yang baik. Menurut Udin S.Winataputra, dkk (2007:5;52) dalam pembelajaran PPKn, kemampuan menguasai metode pembelajaran merupakan salah satu persyaratan utama yang harus dimiliki guru.

Metode yang dipilih dalam pembelajaran PPKn harus disesuaikan dengan karakteristik tujuan pembelajaran PPKn, karakteristik materi pembelajaran PPKn, situasi dan lingkungan belajar siswa, tingkat perkembangan dan kemampuan belajar siswa, waktu yang ketersediaan dan kebutuhan siswa itu sendiri.

2.2.2 Tujuan Pembelajaran PPKn

Menurut Depdiknas (2006:49) tujuan pembelajaran PPKn adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut:

- a. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggungjawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Secara umum tujuan pendidikan menurut Maftuh dan Sapriya (2005:30) yaitu mengembangkan pendidikan kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*civics inteliegence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual yang memiliki rasa bangga dan tanggungjawab (*civics responsibility*) dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan menurut Djahiri (1995:10) tujuan pendidikan kewarganegaraan di dalam kehidupan sehari-hari yaitu:

1. Secara Umum.

Tujuan PPkn harus mendukung keberhasilan pencapaian Pendidikan Nasional yaitu: “mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.”

2. Secara Khusus.

Tujuan PPKn yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku dan memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa

dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran terdapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan menurut Sapriya (2001), tujuan Pendidikan kewarganegaraan adalah dengan partisipasi yang penuh nalar dan tanggungjawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggungjawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang mengingatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat serta perbaikan masyarakat.

2.2.3 Karakteristik Pembelajaran PPKn

Melalui hasil telaah penulis menemukan karakteristik pembelajaran PPKn yang tepat di antaranya adalah memuat nilai dan norma sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, media mampu memberikan pesan maupun harapan, menarik minat siswa dan mampu membuat siswa untuk berfikir kritis.

2.2.4 Tantangan Dalam Pembelajaran PPKn

Saat ini negara sedang berkoar-koar tentang pembentukan karakter dan penerapan rasa nasionalisme yang lebih nyata di setiap kehidupan masyarakat khususnya di bidang Pendidikan. Lebih utama lagi dalam bidang Pendidikan kewarganegaraan (Simamora, 2014). Tentang mengejar Pendidikan kewarganegaraan di era milenial saat ini butuh usaha keras. Justru tantangan tersebut bukan datang dari materi atau kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri melainkan dari kualitas sumber daya manusia yang kompeten, yaitu guru. Selanjutnya,

Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan sekolah juga mengembangkan misi sebagai Pendidikan Bela Negara, Pendidikan multikultural, Pendidikan lingkungan hidup, Pendidikan hukum, dan Pendidikan Antikorupsi.

2.2.5 Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran PPKn

1) Kelebihan

- a. Pengalaman dan kegiatan belajar akan selalu relevan dengan perkembangan siswa.
- b. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan sesuai dengan minat dan kebutuhan anak.
- c. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi siswa sehingga belajar akan bertahan lebih lama.
- d. Pembelajaran terpadu dapat menumbuh kembangkan keterampilan berfikir siswa.
- e. Menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang ditemui siswa dalam lingkungannya.

2) Kekurangan:

- a. Kompetensi dasar yang harus dicapai siswa dalam kurikulum sekolah dasar tahun 2004 masih terpisah-pisah ke dalam berbagai mata pelajaran yang ada.
- b. Dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu dibutuhkan sarana dan prasarana belajar yang memadai untuk mencapai kompetensi dasar secara optimal.
- c. Belum semua guru di sekolah melakukan pembelajaran secara terpadu dan utuh.

2.2.6 Empat Pokok Kebijakan Pembelajaran PPKn

Pada merdeka belajar episode pertama, kemendibud menetapkan empat pokok kebijakan Pendidikan di antaranya :

1. Menghapus ujian sekolah berstandar nasional (USBN)
2. Mengganti ujian nasional (UN)
3. Penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

- a. Metode pembinaan etika sopan santun di lakukan melalui tiga acara yaitu metode demonstrasi, ceramah, dan bermain peran.
- b. Kendala yang di hadapin guru adalah karakter siswa yang berbeda dan berubah - rubah karena usia siswa masih labil.
- c. Upaya yang di lakukan dalam mengatasi kendala adalah dengan kerja sama antara pihak sekolah, keluarga, maupun masyarakat.